



Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan

Fani Anastasia Sitohang¹⁾, Nalom Siagian²⁾, Jonson Rajagukguk³⁾

Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

fani.anastasia@student.uhn.ac.id¹⁾

nalom.siagian@uhn.ac.id²⁾

jonson.rajagukguk@uhn.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan bantuan sosial tunai dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial tunai serta menganalisis dampak bantuan sosial tunai terhadap kesejahteraan masyarakat penerima di Kelurahan Sidorame. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh keinginan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat diukur semata-mata dengan angka, yaitu proses implementasi kebijakan dan persepsi kesejahteraan. Informan Kunci yaitu Lurah atau Sekretaris Lurah Sidorame, Informan Utama: Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra) dan para Kepala Lingkungan (Kepling) dan Informan Pendukung: Masyarakat penerima manfaat BST di Kelurahan Sidorame. Analisis data menggunakan model Miles yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidorame Barat I dengan tingkat keberhasilan yang signifikan pada indikator Komunikasi dan Disposisi. Informasi mengenai hak dan kewajiban KPM tersampaikan dengan baik melalui pendamping PKH, sehingga 248 KK penerima manfaat memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi syarat bantuan. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi informan dalam mengalokasikan dana sesuai dengan komponen bantuan yang mereka terima, adanya kategorisasi pemanfaatan dana yang sangat strategis bagi keberlangsungan hidup rumah tangga dan kriteria evaluasi William N. Dunn, program PKH telah memenuhi standar efektivitas dan ketepatan. Namun, dari sisi kecukupan, bantuan ini masih bersifat bantuan stimulus dan belum sepenuhnya mampu menjadi solusi tunggal untuk membawa masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen tanpa didampingi oleh program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This study aims to describe the implementation process of the cash social assistance policy, identify inhibiting factors in its implementation, and analyze the impact of cash social assistance on the welfare of recipient communities in Sidorame Village. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. The choice of qualitative methods is based on the researcher's desire to explore phenomena that cannot be measured solely with numbers, namely the policy implementation process and perceptions of welfare. Key informants include the Village Head or Village Secretary of Sidorame; Key informants include the Head of the Community Welfare Section (Kasi Kesra) and the Heads of Neighborhoods (Kepling); and Supporting informants include BST beneficiaries in Sidorame Village. Data analysis used the Miles model, namely: Data Reduction, Data Presentation, and Decision Making. The results of the study indicate that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sidorame Barat I



Village achieved significant success in the Communication and Disposition indicators. Information regarding the rights and obligations of beneficiaries (KPM) was well conveyed through PKH facilitators, resulting in a strong commitment from 248 beneficiary families to comply with the assistance requirements. This is evidenced by the consistency of informants in allocating funds according to the components of the assistance they received, the categorization of fund utilization as highly strategic for household survival, and the William N. Dunn evaluation criteria, indicating that the PKH program has met the standards of effectiveness and accuracy. However, in terms of adequacy, this assistance is still primarily stimulus assistance and is not yet fully capable of being the sole solution to lift communities out of poverty permanently without the support of other economic empowerment programs.

Key words: Policy Implementation, Social Assistance, Community Welfare

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan publik yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial adalah kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, khususnya program bantuan sosial. Bantuan sosial dirancang untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, miskin, atau terdampak situasi darurat, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Secara konsep, implementasi kebijakan BST diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat kelurahan. Proses implementasi ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan, hingga pelaporan dan evaluasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antar pihak, transparansi, ketepatan sasaran, serta partisipasi masyarakat.

Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Perjuangan, merupakan salah satu wilayah yang menerima program BST. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, dengan sebagian warganya bekerja di sektor informal dan memiliki pendapatan yang tidak tetap. Kondisi ini membuat BST menjadi salah satu sumber bantuan yang sangat dibutuhkan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini di Kelurahan Sidorame belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dari perspektif penerima manfaat dan aparat pelaksana di tingkat kelurahan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana proses implementasi kebijakan BST di Kelurahan Sidorame, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah di uraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: bagaimana proses implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan Sidorame Kecamatan Medan Perjuangan, apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan Sidorame, Serta bagaimana dampak bantuan sosial tunai terhadap kesejahteraan masyarakat penerima di Kelurahan Sidorame.

Sementara yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan Sidorame Kecamatan Medan Perjuangan, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan Sidorame dan untuk menganalisis dampak bantuan sosial tunai terhadap kesejahteraan masyarakat penerima di Kelurahan Sidorame.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh keinginan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat diukur semata-mata dengan angka, yaitu proses implementasi kebijakan dan persepsi kesejahteraan.

1. Pendekatan Kualitatif: Peneliti ingin memahami "realitas di balik data". Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) seringkali melibatkan dinamika sosial, emosi masyarakat, dan perilaku birokrasi yang kompleks. Dengan kualitatif, peneliti dapat menangkap nuansa tersebut melalui interaksi langsung dengan aktor-aktor di Kelurahan Sidorame.
2. Jenis Deskriptif: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti akan menarasikan bagaimana model George C. Edwards III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi) bekerja secara riil di lokasi penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Peneliti memilih lokasi ini karena karakteristik wilayahnya yang merupakan kawasan pemukiman padat di pusat kota dengan tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi, sehingga tantangan dalam penyaluran bantuan sosial menjadi sangat menarik untuk dikaji secara mendalam.

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi untuk menjamin kedalaman dan validitas data: Wawancara Mendalam (In-depth Interview), Observasi Non Partisipan dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan. Agar kesimpulan memiliki kekuatan akademis dan terhindar dari bias subjektivitas peneliti, maka dilakukan prosedur verifikasi yang ketat, antara lain: Pengecekan Konsistensi (Confirmability): Menelusuri kembali jejak audit (*audit trail*) untuk memastikan bahwa kesimpulan benar-benar berasal dari data lapangan, bukan sekadar intuisi peneliti. Triangulasi Data: Melakukan pengujian silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika ketiga sumber tersebut mengarah pada titik temu yang sama, maka kesimpulan dinyatakan solid. Refleksivitas: Peneliti melakukan evaluasi diri terhadap pengaruh latar belakang pribadinya terhadap interpretasi data, guna memastikan objektivitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, terdapat sebanyak 248 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jumlah 248 KK ini tersebar di berbagai lingkungan di Kelurahan Sidorame Barat I. Wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan tingkat ekonomi yang bervariasi, di mana sebagian besar penerima manfaat bekerja di sektor informal (buruh harian lepas, pedagang kecil, dan pekerja jasa).

Temuan Penelitian (Hasil Wawancara)

Pemanfaatan Dana PKH untuk Sektor Pendidikan (Informan 1-4)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti di Kelurahan Sidorame Barat I, ditemukan bahwa pemanfaatan dana PKH oleh Informan 1 sampai dengan Informan 4 memiliki kecenderungan yang sama, yaitu diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan anak. Para informan menyadari bahwa bantuan ini merupakan bantuan bersyarat yang mewajibkan keberlangsungan sekolah anak-anak mereka.

Informan 1 menjelaskan bahwa setiap kali bantuan cair, langkah pertama yang dilakukan adalah menyisihkan dana untuk biaya SPP atau kebutuhan alat tulis. Hal ini diperkuat oleh



pernyataan Informan 3 yang mengatakan:

"Bantuan ini sangat meringankan beban saya, terutama saat masuk semester baru atau saat anak-anak butuh perlengkapan sekolah tambahan." (Informan NW, 15 feb 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa bagi 248 KK di Sidorame Barat I, PKH berperan sebagai penjamin akses pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

PKH sebagai Penopang Kebutuhan Dasar dan Pangan (Informan 5-8)

Temuan berbeda didapatkan dari Informan 5 sampai 8. Kelompok informan ini cenderung menggunakan dana PKH untuk menutupi kekurangan biaya konsumsi rumah tangga sehari-hari. Mengingat kondisi ekonomi di wilayah Medan Perjuangan yang dinamis, dana bantuan ini menjadi jaring pengaman agar ketahanan pangan keluarga tetap terjaga.

Informan 5 menyatakan bahwa tanpa adanya dana PKH, pemenuhan gizi keluarga seringkali terabaikan karena pendapatan suami yang tidak menentu. Peneliti menangkap adanya pola penggunaan dana yang sangat hemat di mana bantuan tersebut dialokasikan untuk membeli sembako (beras, minyak, dan telur). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan sosial PKH telah berjalan efektif bagi mereka yang berada di garis kemiskinan.

"Sangat membantu untuk belanja beras dan minyak goreng. Apalagi kalau pas bantuan cair, beban belanja mingguan jadi lebih ringan sedikit." (Informan 5 RP, 16 feb 2026, Komunikasi Pribadi)

Kontribusi terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga

Bagi Informan 9 dan 10, dana PKH tidak hanya dilihat sebagai bantuan untuk satu pos pengeluaran saja, melainkan sebagai faktor pendukung stabilitas ekonomi keluarga secara makro. Informan dalam kelompok ini menjelaskan bahwa bantuan tunai tersebut membantu mereka mengatur arus kas keuangan rumah tangga dengan lebih baik.

Dengan adanya suntikan dana dari PKH, pengeluaran rutin yang biasanya membebani penghasilan utama dapat dialihkan. Hal ini memberikan ruang bagi keluarga untuk memiliki sedikit cadangan finansial untuk kebutuhan mendesak lainnya. Dalam konteks 248 KK penerima di Sidorame Barat I, hal ini menciptakan rasa aman secara psikologis dan ekonomi bagi para ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan.

Pembahasan

Setelah memaparkan hasil wawancara di atas, maka pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis lebih mendalam dengan mengaitkan temuan lapangan di Kelurahan Sidorame Barat I dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn.

Secara keseluruhan, keberadaan 248 KK penerima PKH di Kelurahan Sidorame Barat I menunjukkan bahwa program ini menjadi pilar utama perlindungan sosial di wilayah tersebut.

1. Akses Pendidikan: Program PKH berhasil memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Sidorame Barat I tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa terhambat kendala biaya.
2. Ketahanan Pangan: Dana PKH berfungsi sebagai subsidi konsumsi yang menjaga agar KPM tidak kekurangan nutrisi dasar.
3. Kesejahteraan Sosial: Distribusi bantuan kepada 248 KK ini secara tidak langsung membantu menjaga daya beli masyarakat di tingkat kelurahan, yang berdampak pada perputaran ekonomi lokal di Kecamatan Medan Perjuangan.

Analisis Implementasi Kebijakan (Teori Edwards III)

Menurut George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

- Komunikasi & Disposisi: Temuan peneliti menunjukkan bahwa informasi mengenai peruntukan dana PKH tersampaikan dengan baik kepada 248 KK di Sidorame Barat I. Hal

ini dibuktikan oleh Informan 1-4 yang memiliki pemahaman kuat (disposisi) bahwa dana tersebut wajib digunakan untuk pendidikan.

- Sumber Daya: Bagi Informan 5-8, dana PKH merupakan sumber daya finansial krusial yang menutupi keterbatasan ekonomi mereka. Efektivitas penyaluran di tingkat Kelurahan Sidorame Barat I menunjukkan bahwa birokrasi penyaluran telah berjalan secara konsisten, sehingga bantuan dapat membantu kebutuhan pokok sehari-hari.

Perspektif Otoritas Lokal (Hasil Wawancara Kepala Lingkungan)

Untuk memperkuat temuan dari sisi penerima manfaat, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Mutiara selaku Kepala Lingkungan 1(satu) di wilayah Kelurahan Sidorame Barat I. Beliau menjelaskan bahwa proses pemantauan terhadap 248 KK penerima PKH dilakukan secara rutin untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Kepling:

"Kami selalu berkoordinasi dengan pendamping PKH untuk memantau apakah anak-anak dari keluarga penerima benar-benar sekolah atau tidak. Jika ada kendala di lapangan, kami pihak lingkungan membantu memfasilitasi komunikasi dengan pihak Kelurahan." (Wawancara, Tanggal 16 Februari 2026).

Data dari Kepling ini memvalidasi pernyataan Informan 1-4 mengenai kewajiban sekolah, sekaligus menunjukkan bahwa unsur Struktur Birokrasi dalam teori Edwards III telah berjalan secara sinergis di Kelurahan Sidorame Barat I.

Analisis Evaluasi Kebijakan (Teori Dunn)

William N. Dunn (2018) mengemukakan beberapa kriteria untuk mengevaluasi kinerja kebijakan, di antaranya adalah Efektivitas dan Kecukupan.

- Efektivitas: Kebijakan dikatakan efektif jika mencapai tujuan. Di Kelurahan Sidorame Barat I, kebijakan ini efektif dalam dimensi pendidikan. Pernyataan Informan 1-4 mengenai pembiayaan sekolah membuktikan bahwa tujuan PKH untuk meningkatkan akses pendidikan telah tercapai di lapangan.
- Kecukupan: Kriteria ini melihat sejauh mana hasil kebijakan memecahkan masalah. Temuan pada Informan 8-10 menunjukkan bahwa meski dana PKH membantu stabilitas ekonomi, tingkat "kecukupan" ini masih bersifat bantuan dasar. Bagi warga di Kecamatan Medan Perjuangan, dana tersebut lebih berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi ketimbang solusi absolut untuk keluar dari kemiskinan (graduasi).

Sintesis Temuan dengan Lokasi Penelitian

Secara keseluruhan, implementasi PKH di Kelurahan Sidorame Barat I telah memenuhi standar komunikasi yang baik sehingga para penerima manfaat (KPM) menggunakan dana sesuai peruntukannya. Mengacu pada kriteria Dunn, keberadaan 248 KK penerima manfaat menunjukkan adanya upaya pemerataan kesejahteraan yang signifikan di wilayah Medan Perjuangan, meskipun tingkat kecukupannya masih perlu didukung oleh program pemberdayaan ekonomi tambahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan telah memberikan gambaran mendalam mengenai dampak kebijakan sosial terhadap masyarakat ekonomi rendah. Berdasarkan analisis data terhadap 248 KK penerima manfaat dan wawancara mendalam dengan 10 informan utama, maka peneliti menyimpulkan beberapa poin esensial sebagai berikut:

Pertama: ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidorame Barat I menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan pada indikator Komunikasi dan Disposisi. Informasi mengenai hak dan kewajiban KPM tersampaikan



dengan baik melalui pendamping PKH, sehingga 248 KK penerima manfaat memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi syarat bantuan. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi informan dalam mengalokasikan dana sesuai dengan komponen bantuan yang mereka terima.

Kedua: hasil penelitian menunjukkan adanya kategorisasi pemanfaatan dana yang sangat strategis bagi keberlangsungan hidup rumah tangga.

- a. Bagi kelompok informan dengan tanggungan anak sekolah, dana PKH secara efektif menjadi instrumen pembiayaan pendidikan yang krusial, mencegah terjadinya putus sekolah.
- b. Bagi kelompok masyarakat dengan kerentanan ekonomi tinggi, bantuan ini berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan harian yang menjaga stabilitas konsumsi keluarga.
- c. Secara keseluruhan, PKH berperan sebagai jaring pengaman sosial yang meredam guncangan ekonomi masyarakat di wilayah Medan Perjuangan.

Ketiga: merujuk pada kriteria evaluasi William N. Dunn, program PKH telah memenuhi standar efektivitas (tujuan tercapai) dan ketepatan (manfaat dirasakan langsung). Namun, dari sisi kecukupan, bantuan ini masih bersifat bantuan stimulus dan belum sepenuhnya mampu menjadi solusi tunggal untuk membawa masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen (graduasi mandiri) tanpa didampingi oleh program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan program ke depan:

a. Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pendamping PKH:

Disarankan agar pihak kelurahan dan pendamping sosial tidak hanya fokus pada penyaluran dana tunai, tetapi juga mulai menginisiasi program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan atau akses modal usaha mikro bagi 248 KK tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong program graduasi mandiri agar KPM memiliki ketahanan ekonomi tanpa bergantung selamanya pada bantuan sosial.

2. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

Para penerima manfaat di Kelurahan Sidorame Barat I diharapkan dapat lebih bijak dalam manajemen keuangan rumah tangga. Prioritas pada pendidikan dan kesehatan anak harus tetap dijaga, namun juga perlu mulai mempertimbangkan pengalokasian sebagian kecil sumber daya untuk unit usaha produktif guna meningkatkan pendapatan keluarga secara mandiri.

b. Saran Akademis

Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini fokus pada pemanfaatan dana secara kualitatif, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode Mixed Methods atau kuantitatif guna mengukur secara eksak korelasi antara besaran dana PKH terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan. Selain itu, penelitian mengenai hambatan teknis birokrasi dalam pendataan ulang (pemutakhiran data) juga sangat diperlukan untuk menyempurnakan ketepatan sasaran kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023*. BPS Sumatera Utara.



- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Edwards, G. C. I. I. I. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Friedlander, W. A., & Apte, R. Z. (1980). *Introduction to Social Welfare* (4th ed.). Prentice-Hall.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Tunai*.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2010). *Implementation and Public Policy*. University Press of America.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kota Medan. (2023). *Laporan Tahunan Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2023*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial